

SKRIPSI

HOAKS DALAM PILKADA

(Studi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Disusun dan Diajukan Oleh:

A. KURNIAWAN RAMADHANI

E041181310

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

HOAKS DALAM PILKADA

(Studi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Universitas Hasanuddin

OLEH

A. KURNIAWAN RAMADHANI

E041181310

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN
·SKRIPSI
HOAKS DALAM PILKADA
(Studi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020)

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. KURNIAWAN RAMADHANI

E041181310

Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal. *12* Januari 2023

Menyetujui,

Pendamping Utama


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si.

NIP. 19730813 199802 2 001

Pendamping Pendamping


Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP.

NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. Ang Yakub, M.Si..Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023



HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
HOAKS DALAM PILKADA
(Studi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020)

Disusun dan Diajukan Oleh :

A. KURNIAWAN RAMADHANI

E041181310

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

Menyetujui,

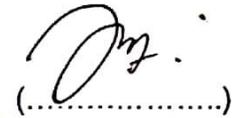
PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si.



(.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.



(.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub. M.Si..Ph.D



(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si.



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. KURNIAWAN RAMADHANI

NIM : E041181310

Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)

Program studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "HOAKS DALAM PILKADA (Studi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Januari 2023



A. Kurniawan Ramadhani

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HOAKS DALAM PILKADA (Studi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020)**”. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama pembuatan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang telah menemani perjalanan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan penulis dalam pendahuluan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang terhebat yang dikirimkan Tuhan kepada penulis, yaitu kedua orang tua tercinta, Bapak **Andi Mahmud** dan Ibu **Andi Darnawati**, dan juga Bapak **Nurdin** serta ibu **Dahniar** yang menyayangi juga selalu berkorban dan menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan ibuku tercinta dan tersayang, doa kalian yang tiada hentinya selalu terpanjatkan untuk penulis terus berkarya dan melangkah dalam menuntut ilmu sejauh ini. Kepada saudara/i penulis, **Ika Julianty Anggreani, Achmad Nugraha Nurdin, dan Muh. Naufan Nurdin** yang selalu mendoakan dan membantu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M. Si.** selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.** selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor baru Universitas Hasanuddin beserta jajarannya selamat atas masa baktinya, semoga kedepannya memberikan banyak kemajuan dalam sistem pendidikan Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberikan ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Dr. Hasniati S.Sos.**, **Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, Serta **Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si.** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. **Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen- dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, **Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si**, **Bapak Dr. Muhammad Saad, MA**, **Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**, **Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, **Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si**, **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, **Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si**, **Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si**, **Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, **Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, **Bapak Zulhajar,**

S.IP, M.Si, dan **Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh **Staf Akademik Departemen Ilmu Politik** yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi seorang mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar kelas perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Kepada teman-teman sahabat **Ilmu Politik 2018** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Kepada saudara saudaraku **Revolusi18** Terima kasih telah menjadi saudara yang sangat baik yang selalu membantu dan mendukung dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Kepada sobat sepermainan **BTP Nasram, Aria, Sulton, Ari, Irdan, Topik, Ronaldi, Eco**, dan **Yanto** yang selalu kebersamai penulis dalam kondisi suka maupun duka.
11. Kepada **Pejuang Muda KTT** saudara saudari terbaik sepanjang masa **Nasram Patanuari Dwi Gusti, Fatkhul Nursafaah, Aan Winandi, Nabila Aulia Nisa, Humaerah Nisai, Zachwa noor haliza**, dan **Marisya Maharani**. Yang telah mengajarkan penulis banyak hal positif

serta selalu menudukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tulisannya.

12. Kepada sahabat **KKN UNHAS 106 Kabupaten Wajo** yang telah kebersamai penulis dalam mengikuti program pengabdian masyarakat selama mengikuti perkuliahan.

13. Kepada sahabat **HIPERMAWA UNHAS** terima kasih telah menjadi saudara terbaik sekampung halaman dan menjadi obat rindu di tanah perantauan.

14. Kepada setiap **Informan** yang telah meluangkan waktunya dan bersedia membantu penulis dengan ikhlas dalam mengumpulkan informasi yang dijadikan bahan dalam tulisan ini.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah dikehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 12 Januari 2023

A. Kurniawan Ramadhani

ABSTRAK

A. Kurniawan Ramadhani. NIM E041181310. Hoaks Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020). Dibimbing oleh Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si. dan Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hoaks yang muncul pada calon walikota Danny Pomanto dan Munafri Arifuddin pada Pilkada Walikota Makassar tahun 2020. Serta keterpengaruhannya berita hoaks pada hasil pilkada Kota Makassar yang diketahui Danny Pomanto menang melawan Munafri Arifuddin sebagai kompetitornya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan secara alami atau lebih mendalam tanpa adanya prosedur serta mendapat pengaruh sosial yang dapat dinilai sendiri tanpa harus diukur. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal tersebut dilakukan dengan melihat bahwa peneliti telah mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung dengan mewawancarai pihak terkait dan juga masyarakat dengan keadaan sebelumnya telah di observasi untuk kemudian diabadikan menjadi sebuah bukti dari penelitian terkait.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kegiatan penyebaran berita palsu/hoaks masih muncul secara masih pada pilkada walikota makassar tahun 2020. Keberadaan berita hoaks ini berbentuk propaganda yang mana kegiatan dilakukan dengan menyebarkan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini masyarakat Makassar. Kemudian berita hoaks juga mempengaruhi hasil pilkada kota makassar dikarenakan masyarakat merasa empati kepada Danny pomanto sebagai korban hoaks dibandingkan dengan Munafri Arifuddin.

Kata kunci: Hoaks, Pemilihan Walikota, Propaganda

ABSTRACT

A. Kurniawan Ramadhani. NIM E041181310. Hoaxes in Pilkada (Case Study of Makassar Mayoral Election 2020). Supervised by Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si. and Ummi Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

This study aims to find out the forms of hoax that appeared in the mayoral candidates Danny Pomanto and Munafri Arifuddin in the 2020 Makassar Mayoral Election. As well as the influence of hoax news on the Makassar City election results which Danny Pomanto found out that he won against Muafri Arifuddin as his competitor.

The type of research used is qualitative research. Data collection can be done naturally or obtained more without procedures and social influences that can be self-assessed without having to be measured. Data collection techniques used such as interview techniques, observation, and documentation. This was done by seeing that researchers had obtained information that was carried out directly by interviewing related parties and also the community with previous conditions that had been observed to then be immortalized as evidence from related research.

The results of this study found that the activity of spreading fake news/hoaxes still appears in the 2020 Makassar mayoral election. The existence of this hoax news is in the form of propaganda where activities are carried out by spreading information, facts, arguments, gossip, half-truths, or even lies. to influence public opinion Makassar. Then the hoax news also affected the results of the elections for the city of Makassar because the people felt empathy for Danny Pomanto as a victim of hoaxes compared to Munafri Arifuddin.

Keywords: Hoax, Mayoral Election, Propaganda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Propaganda Politik.....	14
2.1.1 Konsep Propaganda Politik.....	14
2.1.2 Teknik-Teknik Propaganda Politik.....	18
2.2 Berita Hoaks	20
2.2.1 Konsep Berita Hoaks	20
2.2.2 Jenis-Jenis Berita Hoaks	23
2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Berita Hoaks.....	24
2.2.4 Dampak Berita Hoaks.....	25
2.3 Pemilihan Umum	27
2.3.1 Konsep pemilihan umum	27
2.3.2 Pilkada Kota Makassar Tahun 2020	28
2.4 Literatur Review	31

2.5	Kerangka Pemikiran	32
2.6	Skema Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Lokasi Penelitian	35
3.2	Jenis Penelitian	35
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		43
4.1	Gambaran Umum Kota Makassar	43
4.1.1	Jumlah Penduduk di Kota Makassar	44
4.1.2	Pengguna Media Sosial di Kota Makassar	45
4.1.3	Kondisi Sosial Politik Kota Makassar	48
4.2	Profil Moh. Ramdhan Danny Pomanto	49
4.3	Profil Munafri Arifuddin	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		54
5.1	Bentuk-Bentuk Hoaks Danny Pomanto pada Pilkada kota Makassar Tahun 2020. 54	
5.1.1	Berita Hoaks Danny Pomanto.....	54
5.1.2	Analisis Berita Hoaks Danny Pomanto	60
5.2	Bentuk-Bentuk Hoaks Munafri Arifuddin Pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 65	
5.2.1	Berita Hoaks Munafri Arifuddin.....	65
5.2.1	Analisis Berita Munafri Arifuddin.....	70
5.3	Keterpengaruhannya Hoaks pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020.....	73
5.3.1	Hoaks Sebagai Alat Propaganda Politik.....	74
5.3.2	Hoaks Menguntungkan korban serangan hoaks	80
5.3.3	Hoaks merugikan pelaku penyebar Hoaks	86
BAB VI PENUTUP		91
6.1	KESIMPULAN	91
6.2	SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA.....		94

LAMPIRAN 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. jenis berita bohong yang sering diterima..... 4
Gambar 2. peta kota Makassar 43
Gambar 3. persentase penggunaan media sosial 47
Gambar 4. Fliyer Danny-Fatma 50
Gambar 5. fliyer Appi-Rahman 52
Gambar 6. berita Hoaks Danny Pomanto..... 54
Gambar 7. berita Hoaks Danny Pomanto 54
Gambar 8. berita Hoaks Danny Pomanto 56
Gambar 9. berita Hoaks Danny Pomanto 58
Gambar 10. berita Hoaks Danny Pomanto 59
Gambar 11. berita Hoaks Munafri Arifuddin 65
Gambar 12. berita Hoaks Munafri Arifuddin 67
Gambar 13. berita Hoaks Munafri Arifuddin 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan yang berdaulat adalah salah satu wujud konkret dari proses berjalannya demokrasi. Sebagai sebuah momentum yang penting, peran dan pengaruh dari pemilihan tidak dapat dipandang sebelah mata. Paling tidak, pemilihan menjadi wadah bagi masyarakat berupa kesempatan secara formal yang paling jelas untuk berkontribusi secara aktif pada proses politik. Pemilihan juga dipandang sebagai sebuah manifestasi yang nyata dari kepentingan masyarakat; singkatnya, “rakyat telah berbicara”.¹

Pemilihan bersifat menyeluruh dan merata bagi seluruh rakyat. salah satu konsepsi pemilihan yang modern diajukan oleh Joseph Schumpeter (2005), dikutip oleh S.H Sarundajang, yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria umum bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi². Salah satu pemegang kunci keberhasilan adalah peranan media, Karena arus informasi yang cepat dan meluas di dapat melalui media.

¹ Andrew Heywood, *Politik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014, Hal. 374

² Hardini Hasanuddin (dkk), *Peran Media Massa dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, Vol. V No. 1 April 2015, Hal. 38

Berkiblat pada pentingnya kedudukan pemilihan sebagai momentum kedaulatan rakyat, maka seyogyanya segala aspek apapun yang berhubungan dengan kesuksesan pelaksanaan pemilihan harus diusahakan agar terlaksana dengan baik. dan upaya untuk memberikan keterbukaan dan kebebasan pada rakyat dalam bersuara menentukan pemimpin mereka bisa terwujud. Tetapi sebagai sebuah proses, tentu saja penyelenggaraan pemilihan khususnya di Indonesia masih memiliki banyak kendala yang muncul berupa menyebarnya berita bohong atau yang sering kita kenal dengan istilah hoaks terhadap isu sosial politik.

Berita bohong atau hoaks banyak mewarnai setiap kegiatan pemilihan umum (Pemilu), baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan presiden (Pilpres). Hoaks seolah menjadi “menu wajib” saat proses Pemilu dilaksanakan.³ Hoaks atau yang lebih dikenal dengan informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Namun, hoaks juga bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok.⁴

³ M. Faisal Husna (dkk), *bahaya hoaks bagi pemilih pemula dalam pemilihan walikota binjai tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di smk swasta setia budi binjai*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2021 E-ISSN: 2621-5268), Hal. 193

⁴ Tim Cek Fakta, *kata “hoaks” dan “meme” sudah tercatat di kamus Bahasa Indonesia*, 28 februari 2017, 13:20 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme> , (diakses pada tanggal 18 Juni 2022, pukul 04:01 WITA)

Hoaks saat ini sudah menjadi *boomerang* bagi kebhinekaan. Berita disebar dengan cara dan sesuai dengan kepentingan. Kebohongan yang disebar berkali-kali akan menjadi kebenaran. Media telah kehilangan fungsinya sebagai sumber informasi faktual. Kini media berubah menjadi alat provokasi dan menebar kebencian terhadap yang berbeda dengan dirinya dan kelompoknya. Munculnya hoaks yang bertebaran ini tidak bisa dilepaskan dari momentum politik. Tidak membutuhkan biaya mahal. Hanya dengan menggunakan *HandPhone* (HP) dapat mengakses berita yang tersebar di jaringan media sosial. Akibatnya cukup dirasakan dalam harmoni kebangsaan, Saling curiga dan gesekan yang tidak terelakkan antar sesama bangsa. Yang paling sering adalah ujaran kebencian yang diucapkan berulang-berulang dan kian menyesak nafas kebangsaan. Jika terus terjadi dan tidak terkendali, tentu akan mengakibatkan perang antar pribadi dan kelompok yang berbeda antara satu sama lainnya.

Dari data yang dilansir oleh Kompas yang melakukan survey pada masyarakat telematika Indonesia (*Master*) secara daring terhadap 1.116 responden pada tanggal 7-8 Februari 2019 dapat dinarasikan bahwa, hoaks terjadi pada sosial politik (Pilkada dan Pemerintah) dengan angka 91,8 persen dan lalu disusul pada soal SARA yang mencapai 88,6 persen, di bawahnya pada masalah kesehatan yang berjumlah 41,2 persen, kemudian pada soal makanan dan minuman yang mencapai 32,6, kemudian pada penipuan dan

keuangan yang mencapai 24,5, IPTEK dengan jumlah 23,7, pada berita duka berjumlah 18,8, pada candaan 10,3, kemudian bencana alam 17,6, dan lalu lintas.⁵ (selengkapnya lihat gambar)



Gambar 1. jenis berita bohong yang sering diterima

Kasus hoaks yang paling berpengaruh terhadap proses perpolitikan di Indonesia adalah pada saat Pilpres 2019 muncul berita penganiayaan yang dilakukan kubu Jokowi terhadap Ratna Sarumpaet. Foto Ratna Sarumpaet babak belur segera menjadi pergunjangan dari mulut ke mulut warganet. Foto itu kali pertama diunggah akun @ayuning_2 yang belakangan dihapus setelah cuitannya bikin gaduh. Berita ini tentu saja membuat gaduh masyarakat terutama di grup pendukung Prabowo-Sandi, kabar Ratna diancam pemerintah segera saja beredar. “Dari Ajudan PS (Prabowo Subianto), penganiayaan itu

⁵ Moh. Abu Na'im, *hoaks sebagai konstruksi sosial untuk kepentingan politik praktis dalam pilgub DKI Jakarta*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. VIII, No 2: 361-370. April 2017. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 (Online), Hal. 364

memang terjadi. Cuma Ratna ditekan pemerintah. Dia di bawah ancaman,” tulis seseorang dengan nama akun *@Fadillahahmad55* di grup WhatsApp Prabowo-Sandi. Kabar bohong yang juga dilahap mentah-mentah oleh Prabowo Subianto ini jadi pintu pembuka serangkaian hoaks menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Dari 60 berita hoaks yang bermuatan politis, Jokowi menjadi target terbanyak. Catatan Subdit Pengendalian Konten Internet Kominfo, Jokowi misalnya dibingkai melalui kabar hoaks bahwa dia berkongsi dengan Cina seperti “Cukong Cina Pendukung Jokowi”. Kabar ini mencomot foto Jokowi dengan perwakilan presiden Tiongkok. Aslinya foto itu adalah pertemuan yang memberi ucapan kepada Jokowi sebagai presiden terpilih pada November 2014. Adapun terhadap Prabowo, salah satu kampanye hitam yang menyerangnya adalah soal keluarganya yang disebut tidak harmonis, gagal mendidik anaknya, perceraian dengan Titiek Soeharto, yang tujuannya tentu untuk mengontraskan pembawaan Prabowo yang terlihat tegas serta membandingkan dengan keluarga Jokowi.

Dalam skala Provinsi, berita hoaks juga marak beredar di masyarakat. Khususnya pada ajang pilkada Sulawesi Selatan. Hoaks yang beredar menyerang pasangan calon nomor urut 3 yaitu Nurdin Abdullah berpasangan dengan Sudirman Sulaiman, kabar hoaks tersebut berupa brosur yang disebar secara terang terangan dan menyebutkan bahwa Prof Nurdin Abdullah itu

pembohong. Di dalamnya bergambar jalan rusak dan disebutkan sebagai jalan di Bantaeng yang mana sebelumnya Prof Nurdin Abdullah dikenal sebagai Bupati Bantaeng. Hal ini tentu saja bertujuan untuk merusak citra calon dengan cara menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi lapangan. Contoh lain adalah berita hoaks yang juga menyerang calon Gubernur Sulsel nomor urut satu, Nurdin Halid. Dalam berita melalui media online yang viral turut tersebar di platform media sosial, pasangan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar ini dikabarkan menggelar pertemuan rahasia bersama komisioner KPUD Sulsel. Jubir NH-Aziz, berita tersebut merupakan kabar bohong dan tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi bohong tentu saja merugikan nama baik Nurdin Halid sekaligus KPUD Sulawesi Selatan.

Hoaks juga sangat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah. Sejumlah kabar hoaks masih mewarnai tahapan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan data dari Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang rilis pada tanggal 17 Desember 2020, total terdapat 63 hoaks terkait Pilkada Serentak 2020.⁶ salah satunya kota Makassar yang mana pada tahun 2020 hendak melaksanakan pemilihan Walikota (Pilwalkot).

⁶ Hanz Jimenez Salim, *Kumpulan Hoaks Seputar Pilkada Serentak 2020*, 05 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4425544/kumpulan-hoaks-seputar-pilkada-serentak-2020>, (diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 00:53 WITA)

Pada Pilkada kota Makassar tahun 2020 kemarin, berita bohong (hoaks) banyak menyerang berbagai pihak. Beredarnya cuitan negatif tentang kandidat calon walikota di tengah-tengah masyarakat cukup menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kandidat yang dipilihnya. Kandidat calon banyak diserang hoaks dari berbagai isu. Seperti yang kita ketahui Bersama ada empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang ditetapkan KPU adalah pasangan calon dengan nomor urut satu Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), pasangan calon nomor urut dua Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman). Selanjutnya pasangan calon nomor urut tiga Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN), dan yang terakhir pasangan calon nomor urut empat Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN).

Kabar bohong yang sering menyerang pasangan calon diantaranya adalah isu kapabilitas yang muncul ditengah proses pelaksanaan pilkada kota Makassar Tahun 2020. Terlebih lagi kepada calon walikota Danny Pomanto yang mana latar belakangnya pernah gagal mengikuti kontestasi pilkada kota Makassar tahun 2020. Diketahui bahwa pada saat pelaksanaan pilkada tahun 2018 Danny Pomanto didiskualifikasi atas kasus penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini masih teringat jelas di kepala masyarakat Makassar sehingga banyak oknum yang tidak bertanggung jawab ingin mempropaganda Danny Pomanto dengan menyebarkan berita bohong akan kapabilitas Danny Pomanto.

Dikatakan beredar rekaman suara yang mengatakan bahwa Danny pomanto melakukan pencemaran nama baik. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara mirip Danny Pomanto melakukan analisis terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Danny mengulas penangkapan ini dengan beberapa tokoh, seperti Jusuf Kalla, Novel Baswedan, dan Habib Rizieq Shihab, namun kebenaran berita ini belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Hal ini menyulut emosi simpatisan Danny Pomanto dan kembali meragukan kapabilitas beliau maju di pilkada 2020.

Hoaks juga menyerang pasangan calon nomor urut 2 Munafri Arifuddin. Beredar selebaran yang menyerang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), tersebar luas di beberapa titik di Makassar. Konten selebaran memuat narasi atau kata-kata yang buruk, tanpa dasar tentang Appi-Rahman, yang berkesan sebagai ujaran kebencian, penghinaan, penistaan, yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2 itu. Juru Bicara Appi-Rahman yakni Fadli Noor mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab tersebut terhadap pasangan Appi-Rahman. Menurutnya Ini adalah praktek-praktek berdemokrasi, berpilkada yang paling nista, dan ini juga praktek paling primitif karena dapat merusak *mindset* pemilih terhadap pelaksanaan pilkada di kota Makassar.

Dari keempat pasangan calon yang maju di Pilkada kota Makassar, yang paling banyak mendapatkan serangan berita hoaks adalah calon Walikota Danny Pomanto. Danny mengaku dirinya pernah dikriminalisasi dengan 48 kasus berita bohong yang asal usulnya tidak diketahuinya. Namun tak satupun dari kasus tersebut yang terbukti. Dia pun menjadikan hal ini sebagai citra yang baik karena dia terbukti bersih dari tuduhan. yang kedua Adalah Munafri Arifuddin dengan sebagai salah satu lawan dari Danny Pomanto dan dianggap potensial pada pilkada kota Makassar, namun banyak pihak yang juga ingin menjatuhkan beliau dengan cara menyebarkan berita yang tidak benar asal usulnya dan bermaksud negatif.

Sosok Danny Pomanto dan Munafri Arifuddin bukanlah figur yang baru bagi masyarakat kota Makassar. Mereka berdua sebelumnya merupakan kandidat yang juga bersaing pada pilkada kota makassar tahun 2018 lalu. Namun dikarenakan adanya konflik yang yang terjadi sehingga membuat kedua kandidat ini mempunyai citra yang kurang mengenakan bagi beberapa masyarakat makassar. Hal inilah yang juga seolah menjadi pintu gerbang masuknya kabar-kabar bohong dengan mudah menyerang kedua kandidat ini di kontestasi politik Pilkada kota Makassar tahun 2020.

Penyelenggara juga dalam hal ini dalam hal ini KPU sering disibukkan dengan adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Beredar gambar hasil survei elektabilitas kandidat Walikota dan

wakil Walikota Makassar 2020 yang memuat nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Gambar selebaran yang beredar di media sosial itu juga mencantumkan logo KPU. Gambar tersebut muncul jelang digelarnya pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.⁷ Flyer tersebut berisikan tentang hasil survei pilihan masyarakat kota berdasarkan debat. Hal ini tentu saja membuat heboh masyarakat kala itu dikarenakan banyak yang menilai bahwa KPU sudah tidak menjadi institusi netral dengan mengeluarkan flyer hasil survey, sehingga banyak opini negatif yang muncul di masyarakat melihat pilkada dan KPU sebagai penyelenggara.

Faktanya, komisioner KPU kota Makassar divisi partisipasi masyarakat dan SDM, Endang Sari, menyebut bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan hasil survei pasangan calon pilkada makassar setelah debat publik kedua. Melalui pernyataan resminya, KPU Makassar menegaskan bahwa mereka bukanlah Lembaga survei dan tidak pernah melakukan survei elektabilitas. di selebaran yang beredar juga tidak tercantum nama nama Lembaga survei yang bertanggung jawab atas data data data tersebut. Endang pun menegaskan bahwa flyer survei yang mengatasnamakan KPU kota Makassar adalah hoaks.

⁷ Kompas.com, *[hoaks] survei elektabilitas Pilkada catut KPU Makassar*, 30 november 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/30/162600165/-hoaks-survei-elektabilitas-pilkada-catut-kpu-makassar?page=all> , (diakses pada tanggal 26 juni, pukul 02:05 WITA)

Fenomena hoaks ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat umum mengenai pelaksanaan Pilkada. Seolah masyarakat mulai menganggap bahwa sahnya penyelenggaraan pilkada hanyalah sebuah formalitas saja. Tanpa adanya netralitas ataupun integritas yang ditanamkan oleh pihak terkait. Hal ini tidak terlepas daripada munculnya fenomena hoaks yang kini sudah tidak hanya dianggap sebagai kejahatan media tetapi sudah mulai menjadi problem sosial di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar.

Dari uraian diatas kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian secara deskriptif terkait pengaruh fenomena hoaks yang muncul pada pilkada kota Makassar tahun 2020. Mengingat Maraknya berita bohong atau hoaks tentang politik sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pilkada termasuk pilwalkot di kota makassar. Terlebih ketika masyarakat sudah mulai percaya akan isu isu yang tidak jelas asal usulnya dan dibuat bertujuan untuk menjatuhkan kandidat yang maju sebagai calon Walikota. hal ini tentu saja Sehingga penulis berpendapat bahwa hoaks merupakan salah satu faktor yang bisa sangat mempengaruhi proses perpolitikan di pilkada makassar dan mengangkat judul:

**HOAKS DALAM PILKADA (studi Pemilihan Walikota Makassar tahun
2020)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji melalui pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk hoaks Danny Pomanto pada pilkada kota Makassar tahun 2020?
2. Bagaimana bentuk hoaks Munafri Arifuddin pada pilkada kota Makassar tahun 2020?

1.3 Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk hoaks Danny Pomanto hingga akhirnya bisa menang dalam pilkada kota Makassar tahun 2020.
2. Untuk menjelaskan bentuk hoaks Munafri Arifuddin hingga akhirnya kalah dalam pilkada kota Makassar tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari dua manfaat utama yakni:

1. Manfaat akademik

- a. Menambah wawasan mahasiswa/i Ilmu Politik dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu pengetahuan terkhususnya Ilmu Politik.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang bentuk berita hoaks Danny Pomanto dan Munafri Arifuddin pada Pilkada kota Makassar tahun 2020.
- b. sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai bentuk-bentuk hoaks pada pilkada kota Makassar tahun 2020
- c. Menjadi bahan evaluasi bagi para aktor politik yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah dalam mencari langkah preventif melawan berita hoaks.
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang konsep dan teori yang penulis gunakan yang dapat mendukung jalannya penelitian, Penulis akan menjadikan konsep dan teori tersebut sebagai instrumen analisis penelitian yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Pada bagian ini penulis juga akan membahas tentang kerangka pikir dan skema pikir penelitian, serta literatur review terhadap kasus yang diangkat. Aspek aspek-tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Propaganda Politik

2.1.1 Konsep Propaganda Politik

Propaganda berasal dari bahasa Latin *propagare* artinya cara tukang kebun menyemaikan tunas suatu tanaman ke sebuah lahan untuk memproduksi tanaman baru yang kelak akan tumbuh sendiri. Dengan kata lain juga berarti Mengembangkan atau memekarkan (untuk tunas).⁸ Sementara itu propaganda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang

⁸ Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/propaganda>, (diakses pada tanggal 04 Juli 2022, pukul 15.20)

agar mengikuti suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.⁹ Jadi, propaganda adalah sebuah cara atau strategi yang terstruktur, dilakukan untuk menggiring opini publik oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Laswell menilai propaganda membawa masyarakat dalam situasi kebingungan ragu-ragu dan terpaksa pada suatu yang licik yang tampaknya menipu dan menjatuhkan. Propaganda dianggap sebagai proses diseminasi informasi untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi. Sementara itu menurut Onong Uchyana Effendy propaganda adalah komunikasi yang dilakukan secara terencana, sistematis dan berulang-ulang untuk mempengaruhi seseorang, khalayak atau bangsa agar melaksanakan kegiatan tertentu dengan kesadaran sendiri tanpa paksa atau dipaksa.¹⁰

Propaganda acapkali hanya dimaknai secara terbatas sebagai informasi palsu yang dimaksudkan untuk memantapkan apa yang telah diyakini orang kebanyakan. Asumsinya, jika seseorang mempercayai sesuatu itu salah, maka mereka sentiasa didera keraguan, karena keraguan itu menggelisahkan, orang lantas bersemangat untuk

⁹ Dikutip dari <http://KBBI.Web.id/propaganda>, (diakses pada tanggal 04 Juli 2022, pukul 19.30)

¹⁰ *Ibid*, hal. 5

membuangnya, dan karena itu mereka menjadi terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh mereka yang memiliki otoritas. Bukan hal yang aneh jika propaganda menggunakan teknik-teknik penyampaian pesan yang meyakinkan meski palsu. Lazimnya pesan-pesan itu mengidap sesat logika karena sang propagandis hanya berusaha meyakinkan, tanpa memperdulikan kebenaran pesannya.

Propaganda dalam politik memainkan peran yang sangat penting karena merupakan satu di antara pendekatan persuasi politik selain periklanan dan retorika. Dalam praktiknya, propaganda mengelaborasi pesan politik dunia mendapat pengaruh secara persuasif. Hampir seluruh pendekatan persuasif kepada khalayak di era Reformasi ini menempatkan media massa sebagai instrumen saluran yang mesti digunakan.¹¹

Propaganda politik memiliki tiga tujuan yakni:¹²

- 1) **Mempengaruhi opini publik.** Propaganda tidak hanya mengkomunikasikan fakta-fakta yang dapat mempengaruhi opini publik terhadap suatu isu tertentu. Jadi, salah satu tujuan propaganda adalah mengubah pandangan/persepsi publik

¹¹ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), Hal.345

¹² M. Alif Mahmudi, "Propaganda dalam Film (Analisis Teknik Propaganda Anti-Iran dalam Film *Argo*)", *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, Vol. 06, No 2, Oktober 2013, Hal.86

tentang suatu tindakan yang akan diikuti sesuai dengan pendapat tersebut. Perubahan pendapat itu bisa bersifat positif ataupun negatif.

- 2) **Memanipulasi emosi.** Propaganda dapat dilakukan dalam beberapa teknik seperti memanipulasi kata, suara, simbol pesan nonverbal, agar dapat membangkitkan emosi audiens, bahkan sering dilakukan dengan cara yang membahayakan bagi para propagandis.
- 3) **Menggalang dukungan atau penolakan.** Sasaran utama propaganda adalah mengubah sikap dan perilaku target untuk mendukung atau menolak suatu isu tertentu. Tujuan propaganda ini adalah mengubah suatu posisi sikap dan perilaku seseorang terhadap perilaku lain.

Unsur unsur Propaganda politik adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Komunikasikan, atau target penerima pesan yang diharapkan menerima pesan dan kemudian melakukan sesuatu sesuai pola yang ditentukan oleh komunikator.

¹³ Ahmad Zakiyuddin, *TEKNIK TEKNIK PROPAGANDA POLITIK JALALUDIN RAKHMAT (Studi kasus pada Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat)*, Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018, hal.39

- 2) Pesan tertentu yang telah dirumuskan sedemikian rupa agar mencapai tujuannya dengan efektif.
- 3) Sarana atau medium yang tepat dan sesuai atau serasi dengan situasi dari komunikasi.
- 4) Kebijakan atau politik propaganda yang menentukan isi dan tujuan yang hendak dicapai.
- 5) Dilakukan secara terus menerus.
- 6) Terdapat proses penyampaian gagasan, ide/kepercayaan, atau doktrin.
- 7) Mempunyai tujuan untuk mengubah opini, sikap, dan perilaku individu/kelompok, dengan teknik - teknik mempengaruhi.
- 8) Kondisi dan situasi yang memungkinkan dilakukannya kegiatan propaganda yang bersangkutan.
- 9) Menggunakan cara sistematis prosedural dan perencanaan.

2.1.2 Teknik-Teknik Propaganda Politik

Teknik Propaganda Politik merupakan kemampuan membentuk persepsi tertentu kepada orang lain.¹⁴ Sehingga orang yang mendengarkan dan memahaminya akan terpengaruh secara cepat ataupun lambat, karena setiap teknik propaganda memiliki berbagai

¹⁴ Asep M Syamsul Romli, *Komunikasi Politik*, Bandung, Copyright, 2014, hal. 17

macam dan memiliki pengaruhnya tersendiri. Sehingga dapat mempengaruhi masyarakat berdasarkan apa yang didengarkannya ataupun melihatnya secara langsung atau melalui perantara media elektronik, media sosial, ataupun media cetak.

Berikut adalah macam-macam teknik Propaganda Politik:

1. Teknik Permainan Kata (*Word Game*)

- a. **Name Calling**, pemberian label atau julukan yang buruk terhadap target yang akan di propagandakan. Contohnya adalah label-label propaganda pada masa kini, seperti: teroris, radikal, garis keras, provokator, dan aktor intelektual.
- b. **Glittering Generalities**, merupakan kebalikan dari name calling, yaitu penjulukan ataupun pelabelan yang baik terhadap target yang akan dipropagandakan. Contohnya seperti, demokrasi, moderat, dan demi stabilitas, yang biasanya digunakan oleh para calon penguasa untuk mengikat para pemilih.
- c. **Eufeminism**, merupakan penghalusan kata untuk menghindari kesan buruk, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Contoh dari penggunaan Eufeminism ini seperti, Departemen Perang, Departemen Keamanan, dan kalimat *New World Order*.

2. Teknik Hubungan Palsu (*False Connection*)

- a. **Transfer**, merupakan pemanfaatan kharisma atau citra seseorang sebagai simbol untuk mendongkrak citra propagandis. Contohnya antara lain, PDIP menggunakan nama Bung Karno, PKB mendompleng popularitas Gus Dur, dan Golkar yang hampir memanfaatkan Cak Nun.
- b. **Testimonial**, merupakan teknik dengan cara memanfaatkan perkataan tokoh terkemuka untuk promosi tertentu. Dalam beberapa kegiatan politik cara ini digunakan oleh beberapa partai politik dengan mengundang artis sebagai bintang iklan ataupun menjadikan artis tersebut sebagai anggota partainya.

2.2 Berita Hoaks

2.2.1 Konsep Berita Hoaks

Secara umum hoaks dapat didefinisikan sebagai *a particular kind of disinformation* (sejenis penyalahgunaan informasi) yaitu berupa *false facts that are conceived in order to deliberately deceive or betray audience* (penyebarluasan fakta yang tidak benar untuk menipu audien).

Hoaks adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita

bohong.¹⁵ Sedangkan menurut *cambridge dictionary*, kata hoaks berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, rencana menipu, trik menipu, disebut dengan hoaks. Hoaks diartikan sebagai aktivitas menipu. Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoaks terdiri dari pertama mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan. Kedua adalah sumber berita tidak jelas. Hoaks media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Sementara yang ketiga adalah bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengertiannya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Sedangkan menurut Romeltea (2017) ciri utama hoaks adalah tanpa sumber. Penyebar hoaks biasanya menuliskan: “copas dari grup sebelah” atau “kiriman teman”.¹⁶

Jadi berdasarkan definisi umum ini, informasi dalam hoaks berisikan fakta yang salah (tidak ada dalam kenyataan) dan dengan sengaja disebarluaskan untuk menipu atau membohongi audien (publik). Pada awalnya, hoaks berfungsi sebagai lelucon, candaan, atau humor. Dalam kamus *Oxford Advanced Learners Dictionary* (1995), dikatakan bahwa hoaks merupakan *a lie or an act of deception, usually intended as a 27 joke*

¹⁵ KBBI Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, (diakses pada tanggal 27 juni, pukul 01:39)

¹⁶ Sukma Fatmawati (dkk), *Analisis Berita Hoaks di Korpus Sosial Media Guna Mengembangkan Model “kapak hoaks” (kemandirian pembaca menganalisis konten hoaks) Studi Analisis Wacana Kritis*, Volume 15 Nomor 2, September 2019, Hal. 116

(suatu kebohongan atau tindakan untuk menipu, yang biasanya ditujukan sebagai sebuah lelucon). Kamus tersebut memberikan contoh tentang cerita pemadam kebakaran yang menerima panggilan telepon dari seseorang untuk memadamkan kebakaran, tetapi, pada kenyataannya, kebakaran tersebut tidak pernah ada. Cerita panggilan telepon untuk memadamkan api ini adalah lelucon dan dikategorikan sebagai hoaks.¹⁷

Hoaks bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini public, membentuk persepsi juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoaks beragam tapi pada umumnya hoaks disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, atau ajakan untuk melakukan amalan amalan yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun hal ini yang menyebabkan banyak penerima hoaks terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sehingga akhirnya hoaks ini dengan cepat tersebar luas.¹⁸

¹⁷ Srijan Kumar, Robert West & Jure Leskovec. 2016. Disinformation on the Web: Impact, Characteristics, and Detection of Wikipedia Hoaxes. Artikel. Pada laman <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2883085>

¹⁸ Dedi Rianto Rahadi, *perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial*, vol. 5, no 1, 2017, hal. 61

2.2.2 Jenis-Jenis Berita Hoaks

Adapun jenis-jenis berita hoaks adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) **Fake news:** Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persekongkolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
- b) **Clickbait:** Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c) **Confirmation bias:** Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d) **Misinformation:** Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.

¹⁹ *Op.cit* , hal. 62

- e) **Satire:** Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
- f) **Post-truth:** Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g) **Propaganda:** Aktivitas menyebarkan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Berita Hoaks

Ada tiga alasan mengapa seseorang mengkomunikasikan informasi yang salah secara luas (Kumar, West dan Leskovec, 2016).²⁰

- a) *misinformation is conveyed in the honest but mistaken belief that the relayed incorrect facts are true.* Inti dari alasan pertama ini adalah mengajak publik untuk mempercayai sesuatu yang salah sebagai sebuah kebenaran.
- b) *disinformation denotes false facts that are conceived in order to deliberately deceive or betray an audience.* Sebagai kelanjutan dari alasan pertama yaitu berita bohong yang disebarluaskan

²⁰ Srijan Kumar, Robert West & Jure Leskovec. 2016

dengan sengaja bertujuan untuk membohongi atau mengkhianati publik.

- c) *disinformation by a person is not to mislead an audience into believing false facts, but rather to “convey a certain impression of himself”*. Alasan ketiga ini yang biasa disebut dengan bullshit tujuannya bersifat Disinformation on the *Web* yaitu menciptakan kesan-kesan personal tertentu oleh si penyebar hoaks di mata publik.

2.2.4 Dampak Berita Hoaks

Pelanggaran Etika dan Manipulasi Kognitif. Jika dibawa ke ranah publik, penyebaran berita bohong memiliki konsekuensi serius terhadap kehidupan sosial dan politik. Diantaranya sebagai berikut:²¹

- 1) Berita bohong atau hoaks sebetulnya melanggar etika komunikasi dan secara spesifik dalam dunia jurnalistik melanggar etika jurnalistik. Dalam dunia jurnalisme, sebuah berita harus menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi dan dibuktikan secara empiris, bukan hanya sekedar informasi

²¹ Ruth Wodak and M. Reisigl. 1999. *Discourse and Racism: European Perspectives*. Jurnal V. 28 Hlm. 180-181

- yang berdasarkan pada asumsi pribadi penulis/wartawan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.
- 2) Peran media sosial seperti facebook dan twitter yang sifatnya borderless (tanpa batas) menyebabkan efek distorsi fakta/realitas oleh hoaks bisa menjangkau audiens dengan jumlah yang sangat luas. Selain itu, semua orang bisa menjadi wartawan, editor, dan bisa menyebarkanluaskannya (*share*).
 - 3) Bisa menjadi alat yang efektif untuk memanipulasi pikiran (*cognitive manipulation*) publik untuk mempercayai sesuatu yang salah sebagai suatu kebenaran (*believing a falsity as a truth*). Istilah manipulasi kognitif sengaja diangkat sebagai bagian dari judul artikel ini sebab inti dari penyebaran hoaks adalah memanipulasi dan mengontrol pikiran pembaca yang selanjutnya dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya.
 - 4) Efek dari manipulasi kognitif ini adalah pikiran publik diajak untuk mengaitkan satu isu dengan isu lain atau biasa dikenal dengan rantai wacana dalam kajian analisis wacana kritis. Dalam pendekatan sosio-historis, suatu wacana di masa lampau dapat dihadirkan kembali pada teks atau genre teks yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula (Wodak and Reisigl, 1999).

2.3 Pemilihan Umum

2.3.1 Konsep pemilihan umum

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia²². Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat²³. Adapun tujuan diselenggarakan pemilu dan Pilkada adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan demokrasi.

Pilkada pada dasarnya sama dengan Pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain

²² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), Hal, 3.

²³ M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), Hal. 32.

gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.²⁴

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.²⁵

2.3.2 Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung di tingkat lokal untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur), Kabupaten (Bupati/Wakil Bupati) dan Kota (Walikota/Wakil Walikota) yang diselenggarakan secara demokratis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

²⁴ Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas VI*, (Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri,2008), Hal. 34.

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal 27.

problematika Pilkada Kota Makassar dimulai saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menempatkan Pilkada Kota Makassar di peringkat 3 se-Indonesia sebagai pilkada dengan tingkat kerawanan tertinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan skor (74,94).²⁶ Selain itu KPU Kota Makassar menetapkan empat paslon yang dimana masing-masing calon selain berlaga dengan membawa nama tokoh politik nasional juga mendapatkan dukungan dari partai besar yang berkoalisi.²⁷

Pada Pilkada Kota Makassar 2020 atau biasa juga disebut dengan Pemilihan Walikota (Pilwalkot), terdapat empat Pasangan Calon (Paslon) yang mendaftar dalam kontestasi politik tersebut. Keempat paslon tersebut merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di kota Makassar diantaranya paslon nomor 1 Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi (ADAMA) yang diusung dua parpol, Nasdem dan Gerindra. Danny merupakan mantan Walikota Makassar periode 2014-2019. Sebelumnya ia sempat mendaftar menjadi salah satu calon dalam Pilkada 2018 namun dianggap melanggar aturan pemilu sehingga didiskualifikasi. Sedangkan wakilnya Fatmawati Rusdi merupakan istri dari Bupati Sidrap, Rusdi Masse.

²⁶ Bawaslu (*Buku IKP Pilkada Serentak 2020*), (Jakarta: Bawaslu, 2020), hal. 138, www.bawaslu.go.id/publikasi/indeks-kerawanan-pemilu-ikp-pilkada-serentak-2020 (diakses pada 05 Juli 2022)

²⁷ Hasruddin Nur, Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar, Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022) vol.1, 2022, hal.102

Paslon nomor urut 2 Munafri Arifuddin dan Rahman Bando (Appi-Rahman) yang diusung oleh tiga parpol yaitu Demokrat, PPP, dan Perindo. Appi merupakan CEO Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) dan juga merupakan keponakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sebelumnya sempat mengikuti Pilkada 2018 namun kalah melawan kotak kosong. Sedangkan wakilnya Rahman Bando merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Paslon nomor urut 3 Syamsu Rizal dan Fadli Ananda (DILAN) yang diusung oleh tiga parpol yaitu PDIP, Hanura dan PKB. Syamsu Rizal adalah mantan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 dan wakilnya adalah seorang dokter yang juga merupakan direktur PT Ananda Idy Bahagia.

Lalu Paslon yang terakhir nomor urut 4 Irman Yasin Limpo dan Zunnun Nurdin (IMUN) yang diusung oleh tiga parpol, Golkar, PAN, dan PKS. Irman Yasin Limpo berasal dari dinasti Yasin Limpo, adik dari Menteri Pertanian yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo sedangkan Zunnun Nurdin merupakan putra sulung dari mantan ketua PSSI yang juga politikus Golkar, Nurdin Halid.

2.4 Literatur Review

Salah satu tahap penyusunan penelitian adalah dengan berusaha melakukan telaah pustaka pada penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang dengan tema yang sama. Penelitian pertama yaitu oleh Dwi Wahyudi, 2021 yang berjudul “pengaruh berita hoaks di media sosial terhadap masyarakat (studi di kecamatan alam Barajo)”. Secara spesifik penelitian ini membahas mengenai polarisasi penyebaran hoaks serta dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat di kecamatan Alam Barajo.

Penelitian kedua yaitu oleh Rahman Tahir, 2021 yang berjudul “Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019”. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah menjelaskan asumsi terjadinya hoaks dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dasar penggunaan hoaks dalam kegiatan politik yang berpotensi mempengaruhi opini pemilih.

Dan penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian penulis yaitu oleh Yenny Kusuma Astuti, 2017 yang berjudul “pemetaan pesan hoaks dan sumber penyebarannya di media sosial Facebook dan Instagram”. Yang mana penelitian ini menitikberatkan penelitiannya terhadap deskripsi karakteristik

pesan-pesan hoaks di media sosial Facebook dan Instagram serta memetakan sumber-sumber penyebarannya.

Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah variabel serta objek penelitian yang akan diteliti. serta penulis juga akan lebih mendeskripsikan bentuk-bentuk hoaks yang bertebaran pada pilkada kota Makassar sebagai salah satu fenomena propaganda politik.

2.5 Kerangka Pemikiran

pilkada di kota makassar menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan pada pertarungan politik pilkada serentak 2020 karena Pilkada kota Makassar 2020 merupakan pengulangan dari Pilkada 2018 yang kala itu hanya diikuti oleh calon tunggal namun harus kalah melawan kotak kosong. hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat melihat proses pelaksanaan pilkada di kota Makassar yang kini hanya dianggap berulang. masyarakat rentan terpengaruh oleh munculnya berita-berita yang tidak jelas asal usulnya atau yang sering kita dengar istilah hoaks.

Fenomena Hoaks seolah sudah menjadi menu wajib setiap kali pilkada dilaksanakan. Terkhusus di kota Makassar yang notabenenya masyarakat banyak yang menggunakan media sebagai sarana penyebaran berita, tentu saja fenomena hoaks menjadi salah satu momok yang dianggap meresahkan

bagi masyarakat kota Makassar. Penyebaran berita yang tidak terbendung dan terorganisir menjadi salah satu alasan maraknya berita hoaks. Terkhusus pada masa pelaksanaan pilkada, banyak pihak yang merasa terganggu dengan adanya fenomena ini. Tak terlepas Danny Pomanto & Munafri Arifuddin sebagai kandidat calon walikota Makassar.

Kemunculan berita bohong (hoaks) juga merupakan buah dari propaganda oknum yang mempunyai kepentingan politis. Propaganda politik sekarang seolah sudah menjadi bagian politik rutin yang normal dan dapat diterima sebagai komunikasi politik yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi masyarakat dan dilakukan tidak hanya terbatas pada pesan-pesan yang dibuat selama proses penyelenggaraan pilkada. Sehingga penulis tertarik untuk mendeskriptifkan kasus serupa di Kota Makassar. Mengingat banyaknya berita hoaks yang menyerang calon pada saat pelaksanaan pilkada kota Makassar tahun 2020 kemarin.

2.6 Skema Kerangka Pikir

Adapun skema kerangka penelitian penulis adalah sebagai berikut:

